

## DAFTAR PUSTAKA

Agustin Imma W, Hariyani S 2023, 'Pengelolaan Infrastruktur Kota dan Wilayah', UB Press, Malang.

Azis R 2018, 'Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi', Deepublish, Yogyakarta.

B Allan 1987, 'Urban Mass Transportation Planning', McGraw-Hill, New York.

C.J. Khisty, B. Kent. Lall 2005, 'Transportation Engineering : An Introduction', Prentice Hall, Amerika Serikat.

Dewi K, Krisdiyanto A 2024, 'Manajemen Perencanaan Transportasi', Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang.

Departemen Pekerjaan Umum 2004, 'Pt.T-01-2002-B Pedoman Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur', DPU, Jakarta.

Departemen Pekerjaan Umum 2005, 'Pd.T-19-2005-B Pedoman Konstruksi dan Bangunan mengenai Studi Kelayakan Proyek Jalan dan Jembatan', Jakarta.

Departemen Pekerjaan Umum 1997, 'Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 Nomor 036/T/BM/1997 Pd.T-19-2004-B, Pedoman Pencacahan Lalulintas', Jakarta.

Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum 2009, 'Pedoman 008/BM/2009 - Pedoman Konstruksi & Bangunan - Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan', Dirjen BM, Jakarta.

Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah, Departemen Pekerjaan Umum 2006, 'Pedoman 08/BM/05 - Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan', Dirjen Praswil, Jakarta.

Ekowati dkk 2020, 'Buku Ajar Studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek', Undip Press, Semarang.

Fatimah S 2019, 'Pengantar Transportasi', Myria Publisher, Surabaya.

Gusty dkk 2023,'Dasar-dasar Transportasi', Tohar Media, Makassar.

K Bayu, Wulan AT 2018,'Optimalisasi Aksebilitas sebagai Percepatan Pembangunan : Studi Kasus Penataan Jalan di Kabupaten Pangandaran', Jurnal Ekonomi dan Bisnis Udayana,Vol 2,no.1.hh1-2

Lulus dkk 2015,'Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat di Kota Semarang',Jurnal Dinamika Sosial Budaya,Vol 17,No.1,hh1-2.

Mustika 2006,'Manajemen Sumber Daya Manusia', Penerbit Bumi Aksara,Jakarta.

Nazir M 2003,'Metode Penelitian', Ghalia Indonesia,Bogor..

Nur Sholeh M,Faujiyah S 2023,'Pengadaan Material Proyek *Engineering Procurement Construction*' Pustaka Pranala,Yogyakarta.

Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat 2015,'Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 248 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1)',Kemen PU, Jakarta.

Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat nomor 290 tahun2015,'Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat nomor 290 Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional', KemenPU,Jakarta.

Mentri Perhubungan 2006,'Keputusan Menteri Perhubungan nomor 14 tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas',Jakarta.

Mentri Perhubungan 2015,'Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 75 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalulintas', Jakarta.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2012,'Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032',Pemprov Sumbar,Padang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2021, ,Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026’,Pemprov Sumbar,Padang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2008,’ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025’,Pemprov Sumbar,Padang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2020, ‘Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah’, Pemprov Sumbar, Padang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2020, ‘Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat’, Pemprov Sumbar,Padang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2020,’Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat’, Pemprov Sumbar,Padang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2007,’Peraturan Kepala BPN nomor 03 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan PerPres RI nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum’Pemprov Sumbar,Padang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2005, ‘Peraturan Menteri Negara LH yang relevan tentang Jenis Rencana dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Dokumen Lingkungan’Pemprov Sumbar, Padang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2006, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi AMDA’,Pemprov Sumbar, Padang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2023, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat no. 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372),Pemprov Sumbar,Padang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang relevan tentang Prasarana Jalan dan Dokumen lingkungan,Pemprov Sumbar, Padang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2008, 'Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang PU yang wajib dilengkapi dengan UKL/UPL',Pemprov Sumbar,Padang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2010, 'Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan',Pemprov Sumbar,Padang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2011, 'Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 19 tahun 2011 Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (dan Lampiran),Pemprov Sumbar,Padang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2014, 'Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor nomor 03/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan',Pemprov Sumbar, Padang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2010, 'Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 20 tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan',Pemprov Sumbar,Padang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2015, Peraturan Menteri Perhubungan No 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas,Pemprov Sumbar, Padang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2021,'Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang RTRW Kabupaten Agam Tahun 2021-2041',Pemprov Sumbar, Padang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2010, 'Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113)', Pemprov Sumbar, Padang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2021, 'Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 17 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas', Pemprov Sumbar, Padang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2021, Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Pemprov Sumbar, Padang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2016, 'Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah', Pemprov Sumbar, Padang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2000, 'Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 No.54, Tambahan Lembaran Negara RI no.3952)', Pemprov Sumbar, Padang. Nomor 6642', Pemprov Sumbar, Padang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2021, 'Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan', Pemprov Sumbar, Padang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2011, 'Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221)', Pemprov Sumbar, Padang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2006, 'Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655)', Pemprov Sumbar, Padang.

Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP no. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor: 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI nomor 35 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI nomor 35 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2021, 'Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Posma Sariguna JK 2018,'Program Pertahanan dalam Mendorong Perekonomian Nasional Studi Kasus Pembangunan Jalan Trans Papua',Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial',Vol 2,No 1,hh.2-3

R Aditya Rendra 2020,'Analisis Aksebilitas pada Stasiun LRT, Stasiun KRL, dan Stasiun BRT, dalam Penggunaan Transportasi Umum di Kota Bekasi', Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya.

S Arini,M Imam 2019, 'Optimalisasi Pengelolaan dan Pelayanan Transportasi Umum Studi pada Suroboyo Bus di Surabaya', Universitas Kalimantan,Kalimantan.

Suparti 2012,'Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern',Erlangga,Jakarta.

SOP/UPM/GJBM-135, Prosedur Penyiapan Dokumen Studi Kelayakan (Feasibility Studi/FS) Pembangunan Jalan

Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 20/SE/Db/2021 Tentang Pedoman Desain Geometrik Jalan

Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR no.21/SE/Db/2023 tentang Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI)

Sukirman 1992,'Perkerasan Lentur Jalan Raya',Pradnya Paramita,Jakarta.

Suwardo, Haryanto I 2018,'Perancangan Geometrik Jalan : Standar dan Dasar-Dasar Perancangan', Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Tangkilisan H.A 2003,'Kebijakan Publik yang Membumi',Lukman Offset,Yogyakarta

Tamin 2000,'Perencanaan dan Pengembangan Jalan',Insitut Teknologi Bandung,Bandung.

Undang Undang nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU nomor 2 tahun 2014

Tentang Perubahan Atas UU nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

Undang Undang nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU no. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Nomor nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi



Wismantoro Bayu D 2022, 'Manajemen Konstruksi Profesional', Deepublish, Yogyakarta

